



Koran	Hal
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	A8
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kaji Kembali Penggunaan Anggaran DAK dan DAU

PADANG-SINGGALANG

DPRD meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk men dalam kembali rencana penganggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Hasil pendalaman dari TAPD akan menjadi bahan pemba hasan bersama Badan Anggaran (banggar) DPRD Sumbar untuk membahas APBD, baik itu APBD perubahan 2018 maupun APBD 2019.

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim mengatakan, be- berapa waktu lalu, banggar DPRD dan TAPD melakukan konsultasi ke Kementerian Da lam Negeri (Kemendagri), tepat- nya ke Dirjen Perimbangan Anggaran Kementerian Keuan-

gan. Dari konsultasi tersebut didapatkan informasi penting tentang DAK.

Kemendagri menyampaikan untuk menghindari terjadinya si sa anggaran dari DAK, maka strategi penyaluran DAK mulai 2018 maksimal hanya 92 pers- en dari alokasi yang disediakan. "Karena ketetapan Kemendagri itu, alokasi anggaran DAK yang telah ditetapkan dalam APBD 2018 tak akan bisa diperoleh Sumbar 100 persen dari peme- ritah pusat," ujarnya, Senin (27/8).

Padahal, lanjut dia, pada APBD 2018, telah disusun pro- gram dan anggaran dengan asumsi dana DAK akan diterima 100 persen dari pemerintah pu- sat. Dengan begitu, lanjutnya, program yang telah disusun pada APBD 2018 yang bersum- ber dari dana DAK tersebut tak akan bisa terealisasi 100 pers- en karena penyaluran maksimal

dari pemerintah pusat hanya 92 persen. "Kondisi ini tentu ber- dampak terhadap pembayaran kepada pihak ketiga, berhubung dalam perencanaan APBD 2018 awal, alokasi DAK digunakan seluruhnya (100 persen)," ujarn- ya.

Untuk itu, DPRD mengajak pemprov untuk mendalami kem- bali semua program yang didan- ai dengan anggaran DAK, seh- ingga kemudian bisa dirasional- isasi kembali pada APBD Pe- rubahan 2018.

Harus Bermanfaat

Selain DAK, Juru Bicara Frak- si Demokrat DPRD Sumbar, M. Nurnas juga mengingatkan Pem- prov Sumbar untuk mengarah- kan DAU untuk belanja lang- sung yang terkait dengan fasilitas pe- layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

penyediaan layanan publik.

"Kami melihat ketentuan tersebut belum dijalankan opti- mal oleh Pemprov Sumbar," ujar Nurnas.

Dia memaparkan, jika diban- dingkan antara DAU yang diteri- ma penggunaannya lebih ban- yak untuk belanja pegawai. Pada 2018 ini, kata Nurnas, DAU yang diterima Sumbar Rp2,11 triliun. Peruntukkan untuk belanja pe- gawai Rp2,04 triliun. "Sangat jelas penggunaannya lebih ban- yak untuk pegawai," ujarnya.

Pola penggunaan DAU den- gan cara seperti ini, kata Nur- nas, tak sesuai dengan Per- mendagri Nomor 33 Tahun 2017. Makanya, kata dia, Fraksi Demokrat meminta agar pen- gunaan dana DAU untuk APBD 2019 bisa dimanfaatkan untuk belanja langsung. "Terutama untuk pembangunan infrastruk- tur," ujarnya. (401)